

Penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh penyidik ditiptidum Bareskrim Polri = Crime handling of trafficking in persons by ditiptidum bareskrim polri investigators

Enggarani Laufria, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477294&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Ditiptidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Ditiptidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ditiptidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpartisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

<hr />

ABSTRACT

This thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Ditiptidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Therresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic

and socio political conditions make Indonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. The condition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of the reckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeit in an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence the crime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrant workers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing various efforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts. In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crime locations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 3 authority to conduct an overseas examination so as to be challenged by the authorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 The intricately scaled up scalper 3 s notes about the main perpetrator, or even the brokers do not know the main perpetrators at all 4 victims who do not want to testify for fear or are under social, economic and psychological pressure. These obstacles prevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap the perpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators use the Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers, and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts that can be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity by participating in various workshops and trainings 2 continue to encourage law enforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, and also to improve cooperation between countries and with international organizations such as AATIP